



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN
(RENSTRA PD) 2016-2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANJARBARU**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	14
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	16
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	20
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	22
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	25
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah	27
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
BAB VIII. PENUTUP	36

DAFTAR TABEL	ii
Tabel 2.1 PNS BPKAD berdasarkan Eselon	8
Tabel 2.2 PNS BPKAD berdasarkan Golongan	8
Tabel 2.4 PNS BPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja tahun 2011-2015	10
Tabel 2.8 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan 2011-2015	11
Tabel 3.1 Penyerapan Belanja Daerah Tahun 2011-2015	16
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan 2016-2021.....	26
Tabel 5.1 Tujuan,sasaran,strategi dan kebijakan 2016-2021.....	28
Tabel 6.1 Idikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan 2016-2021.....	32
Tabel 7.1 Penetapan indicator kinerja daerah	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Bersamaan dengan perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru menjadi Kota Banjarbaru. Sejak terbentuknya Kota Banjarbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Kota Banjarbaru memiliki kewenangan dalam urusan yang mencakup : (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan kewenangan walikota dan wakil walikota, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, (c) kebudayaan, (d) pertanahan dan (e) tata ruang.

Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah enam tahun dan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis SKPD merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan unsur pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini mempunyai fungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen yang digunakan dan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pengelolaan keuangan dan aset sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan secara optimal.

Rencana Strategis SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 juga akan menjadi acuan dan pedoman resmi seluruh unit organisasi lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu, Renstra SKPD ini juga sebagai bahan dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berjenjang.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan maksud di atas, penyusunan Rencana Strategis SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ini bertujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru ke dalam strategi pembangunan yang terarah, terinci, terukur dan integratif sehingga dapat diimplementasikan selama tahun 2016 - 2021.
- b. Menjadi acuan resmi bagi seluruh unit organisasi lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai landasan dalam penetapan indikator kinerja dalam rangka evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- d. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam bentuk program dan kegiatan beserta anggarannya selama tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjarbaru diatur dengan Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 52 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

Sebelumnya fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan SKPD dengan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Namun dengan ditetapkannya Perda nomor : 11 tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dipisah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru, dimana fungsi pengelolaan keuangan dan aset berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sedangkan fungsi pengelolaan pendapatan daerah berada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru dan Unit Pelaksana Tekhnis. Kemudian pada tahun 2016 dibentuk kembali Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dengan ditetapkannya Perda nomor : 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 11 tahun 2014 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru dengan susunan sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Anggaran
 - b. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya Yang Sah
 - c. Sub Bidang Belanja Bansos, Hibah dan Pembiayaan
- 4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 - a. Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan
 - c. Sub Bidang Persediaan dan PAD Lainnya Yang Sah
- 5. Bidang Penatausahaan Aset Daerah
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemeliharaan
 - b. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
 - c. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang/Aset Daerah

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada lampiran dokumen Rencana Strategis SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru memiliki sumber daya manusia sebanyak 43 orang yang terdiri dari 29 orang PNS dan 14 orang Tenaga Kontrak. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	II	1 orang	
2.	III	4 orang	
3.	IV	11 orang	

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	5 orang	
2.	III	24 orang	
3.	II	3 orang	

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Negeri Sipil	33 orang	
2.	Tenaga Kontrak	15 orang	

Tabel 2.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	9 orang	PNS 8 orang Tenaga Kontrak 1 orang
2.	Sarjana (S1)	27 orang	PNS 20 orang Tenaga Kontrak 7 orang
3.	Sarjana Muda D3/Akademi	6 orang	PNS 5 orang Tenaga Kontrak 1 orang
4.	SLTA	6 orang	PNS 1 orang Tenaga Kontrak 5 orang
	Jumlah	48 orang	

Tabel 2.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat/Kursus yang diikuti

No	Jenis Diklat/Kursus	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk. II	1 orang	Lulus
2.	Diklatpim Tk.III	1 orang	Lulus
3.	Diklatpim Tk.IV	5 orang	Lulus
4.	Kursus Manajemen Proyek	3 orang	Lulus
5.	Kursus Keuangan Daerah	3 orang	Lulus
6.	Manajemen Keuangan Daerah	3 orang	Lulus
7.	Bendaharawan	4 orang	Lulus
8.	Kursus Akuntansi	1 orang	Lulus
	Jumlah	21 orang	

Tabel 2.6 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	22 orang	
2.	Perempuan	26 orang	
	Jumlah	48 orang	

Bagan susunan organisasi sesuai dengan peraturan daerah Kota Banjarbaru No.11 tahun 2014 sebagai berikut

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja yang sudah ditentukan merupakan dasar pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD. Indikator yang dikaji tersebut harus sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai indikator kinerja yang akan diuji, maka perlu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan indikator kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta norma dan standar pelayanan SKPD.

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru yang berhubungan dengan indikator kinerja pada saat penyusunan Rencana Strategis SKPD dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7

Dilihat dari tabel 2.7 Review pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru tahun 2011-2015, rasio capaian prosentase penyerapan anggaran rata-rata 93,03%, dari tahun 2011 sampai 2015 kurang dari 100% hal ini disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Pencapaian kinerja Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran, rasio capaian kinerja rata-rata 100% setiap tahunnya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra.

Pencapaian kinerja pada prosentase pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah sejak tahun 2011 rasio capaian rata-rata 99,93% setiap tahunnya realisasinya melebihi dari target yang telah ditentukan.

Capaian kinerja Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah ditargetkan pada akhir Renstra 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada tahun 2015 Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015 adalah (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian, target tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Renstra 2011-2015 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.8

Sesuai tabel 2.8 capaian kinerja untuk belanja daerah rata-rata realisasi belanja daerah sampai dengan tahun 2015 adalah 85,86 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja daerah Rp.187.382.747.356,- dan rata-rata realisasi belanja daerah Rp. 151.138.044.064,-

Belanja Daerah rata-rata pertumbuhan naik namun ada belanja tak terduga rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan hal ini dikarenakan belanja tak terduga diberikan sesuai dengan keperluan. Begitu pula dengan belanja bansos rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan hal ini disebabkan belanja bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan pelayanan, hampir dapat dipastikan terdapat adanya tantangan maupun peluang. Begitu pula dengan pengembangan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru. Tantangan dan peluang tersebut hendaknya jangan dijadikan alasan untuk menghambat pengembangan pelayanan, akan tetapi sudah semestinya dijadikan suatu pemicu dalam meningkatkan pengembangan pelayanan.

2.4.1 Tantangan

1. Masih adanya SDM pengelola aset yang belum memahami pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pengamanan Barang Milik Daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan.
3. Optimalisasi terhadap Barang Milik Daerah.
4. Sistem Aplikasi Barang Milik Daerah yang belum mendukung dalam penyelenggaraan Operasional penatausahaan BMD.
5. Optimalisasi terhadap Barang Milik Daerah.
6. Penerapan system akuntansi berbasis akrual.
7. Masih kurangnya SDM pengelola keuangan pada SKPD yang berkopetensi di bidang Akuntansi.
8. Meningkatkan akurasi data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu.
9. Kecepatan dan ketepatan waktu penerbitan SP2D.
10. Akurasi data pegawai dalam pembayaran gaji dan tunjangan.
11. Penganggaran berbasis e-budgetting dalam upaya peningkatan kualitas penyusunan Anggaran guna efektif dan efisiensi penggunaan maupun penyerapan anggaran dan efektifitas waktu penganggaran.
12. Peraturan perundangan yang mendukung penganggaran berbasis e-budgetting

2.4.2 Peluang

1. SDM pengelola aset daerah masih dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui pelatihan
2. Pengamanan Barang Milik Daerah secara hukum dan perlindungan secara fisik.
3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dioptimalkan.
4. Meningkatkan sitem Aplikasi barang milik daerah.
5. Penyajian Pelaporan Pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan lengkap dalam pengambilan keputusan.
6. Tersedianya anggaran untuk meningkatkan SDM yang berkopetensi dibidang akuntansi dengan melaksanakan pelatihan dan bimbingan tekhnis.
7. Mengurangi tingkat kesalahan dalam penerbitan SP2D.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 11 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

3.1.1 Kondisi Sekarang

a. Belanja Daerah.

Penyerapan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel B.2.1 dibawah ini :

Tabel. 3.1

Penyerapan Belanja Daerah Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2011	536.450.010.495,92	479.737.985.114,50	89,43%
2012	636.396.347.150,00	550.492.473.721,00	86,50%
2013	783.712.873.340,00	642.131.847.661,00	81,93%
2014	944.932.934.274,53	822.937.911.883,00	87,09%
2015	1.285.980.999.919,09	1.084.290.161.372,38	84,32%

Sumber :LRA 2011-2015 Rata-rata: 85,86%

Rendahnya prosentase belanja pada sebagian unit organisasi.Masih ada beberapa unit organisasi yang penyerapan anggaran belanja masih di bawah 80%, kemudian belanja Hibah penyerapan 74,85% Bantuan Sosial 70,52% diberikan sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan dan belanja Tak Terduga 29,24% merupakan pencapaian realisasi yang terendah dikarenakan tidak adanya bencana alam dan hal lain yang sifatnya mendesak. Tidak terserapnya anggaran belanja dengan optimal pada sebagian SKPD tersebut disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan tentang tata cara pengelolaan keuangan pada SKPD, sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisien dan akuntabel. Akuntabilitas penggunaan anggaran memerlukan strategi yang cermat agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian realisasi anggaran belanja. Selain itu juga pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah dirasakan masih belum optimal.

b. Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama periode satu tahun. Adapun Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru selama tahun 2011-2015 sebagai berikut tabel dibawah :

Tabel. 3.2
Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	TAHUN	OPINI	KETERANGAN
1	2011	WDP	Penatausahaan BMD yang masih belum tertib
2	2012	WDP	Masih terdapat aset daerah yang dalam pencatatannya belum dapat diyakini kewajarannya.
3	2013	WDP	Masih terdapat aset daerah yang dalam pencatatannya belum dapat diyakini kewajarannya.
4	2014	WDP	Dalam Audit BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah menemukan adanya ketidakpatuhan, dan ketidakpatutan dalam pengujian terhadap perundang-undangan. Namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
5	2015	WTP	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Sumber :BPKAD

c. Aset Daerah

Dalam pencatatan jumlah dan nilai aset daerah sampai dengan tahun 2015 dalam Aplikasi Barang Milik Daerah adalah 1.169.593 unit dengan tafsiran harga Rp.2.526.590.725.313,31,-. Aset tersebut terdiri dari : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi dan aset tetap lainnya dapat dilihat dari tabel berikut dibawah :

Tabel.3.3
Rekapitulasi Inventaris Barang Milik Daerah

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	4.289 persil
2	Peralatan dan Mesin	227.330 unit
3	Gedung dan Bangunan	1.021 unit
4	Jalan Jaringan dan Irigasi	2.384 unit
5	Aset Tetap Lainnya	934.569 unit

3.1.2 Permasalahan

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru selama menjalankan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk belanja pembangunan.
2. Masih terdapat alokasi belanja daerah yang belum sesuai dengan program dan kegiatan prioritas.
3. Penggunaan anggaran masih ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Masihnya lemahnya pemahaman tentang penganggaran alokasi dana Hibah dan Bantuan Sosial
5. Serapan anggaran untuk belanja Daerah yang masih dibawah standar 90 %
6. Masih lemahnya kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD sehingga penyajian pelaporan keuangan SKPD masih kurang tepat waktu.
7. Masih kurangnya kemampuan SDM pada SKPD dalam bidang akuntansi.
8. Masih terdapat Pengurus barang pada SKPD yang kurang memahami peraturan pengelolaan barangmilik daerah.
9. Masih terdapat aset tidak bergerak yang belum memiliki status hukum yang jelas.
10. Masih kurangnya perhatian pengurus barang daerah terhadap penatausahaan barang milik daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 maka visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru untuk tahun 2016-2021 adalah :

VISI : "Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter". Visi pembangunan jangka menengah tersebut mengandung makna dapat dijelaskan bahwa :

1. Kota Pelayanan adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga Masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.
2. Berkarakter terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu :
 - Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai relegius.
 - Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan(urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

MISI :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasaranan dan saranaperekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarbaru memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru. Hal ini ditunjukkan melalui :

Misi 4 :

Peran serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Tujuan Misi 4 :

1. Meningkatkan pelayanan publik.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

Sasaran Misi 4 :

1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Strategi Yang akan dilakukan adalah :

1. Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan keuangan.
2. Peningkatan penerapan teknologi informasi melalui peningkatan jaringan dan SDM.

Arah kebijakan dari setiap strategi adalah melaksanakan bimbingan teknis sumber daya manusia pengelolaan keuangan dan identifikasi kebutuhan jaringan dan aplikasi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Demikian pula dengan Rencana Strategis SKPD Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD pada pemerintah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJM provinsi dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun Rencana Strategis SKPD Provinsi terkait, harus selaras dan saling mendukung. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementerian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.

Keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam mencapai sasaran tentu akan berdampak terhadap Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun Rencana Strategis SKPD Provinsi selaku unsur yang melakukan pembinaan kepada daerah otonom. Kontribusi positif akan timbul dalam konteks pengelolaan keuangan selaku unsur pembina tersebut.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah.

Kota Banjarbaru telah memiliki konsep peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000-2010. Peraturan Daerah tersebut hendaknya juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah agar penentuan lokasi kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan penataan ruang wilayah.

Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru bersifat administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah, bukan merupakan pembangunan fisik. Sehingga dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisa lingkungan digunakan dalam rangka menentukan faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dalam upaya menentukan faktor internal dan eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru menggunakan salah satu metode analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats), dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), sedang faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan kelemahan (treats)

Dibawah ini merupakan tabel dari faktor internal dan eksternal yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Banjarbaru :

1.Faktor Internal

NO	KEKUATAN B P K A D KOTA BANJARBARU
1.	Tersedianya gedung kantor dan peralatan kantor.
2.	Tersedianya sumber daya manusia yang berkopentensi di bidang tekhnologi informasI.
3.	Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4.	Tersedianya aplikasi untuk penerapan system akuntansi berbasis accrual.
5.	Penyelenggaran penatausahaan aset daerah dengan menggunakan aplikasi BMD.
6.	Komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk perbaikan pelayanan publik.

NO	KELEMAHAN B P K A D KOTA BANJARBARU
1.	Masih rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah
2.	Belum optimalnya penatausahaan barang daerah yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3.	Masih kurangnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru
4.	Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi.
5.	Aparatur yang belum sepenuhnya memahami terhadap BMD.
6.	Belum maksimalnya perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang pada SKPD

7.	Masih kurangnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru
8.	Masih kurangnya Penatausahaan Keuangan Daerah Sistem /aplikasi masih belum sepenuhnya mendukung dalam penatausahaan BMD.
9.	Masih belum tersedia SDM yang menguasai bidang kepegawaian khususnya dalam hal analisa formasi jabatan.
10.	Tidak tersedianya fasilitas penyimpanan barang persediaan yang aman dan memiliki akses terbatas.
11.	Akses ke dalam gedung BPKAD belum menerapkan sistem akses yang ketat dan terkontrol dengan baik.
12.	Masih kurangnya peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
13.	Belum diterapkannya e-budgeting.

2.Faktor Eksternal

NO	PELUANG B P K A D KOTA BANJARBARU
1.	Optimalisasi terhadap BMD akan meningkatkan PAD dari BMD.
2.	Menjadi leading sector pengelolaan keuangan dalam teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan.
3.	Mudah dalam melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusat & Provinsi dan instansi lain.
4.	Adanya kerjasama (mou) dengan Pemko Bandung dalam rangka e-gov.

NO	ANCAMAN B P K A D KOTA BANJARBARU
1.	Jika pengaman dan pemeliharaan tidak dilakukan BMD dikuasai oleh pihak lain.
2.	Jadwal pemeriksaan yang hampir bersamaan sehingga membatasi kemampuan dalam menyajikan data keuangan secara akurat dan lengkap.
3.	Cepatnya perubahan beberapa peraturan dalam pengelolaan keuangan.
4.	Kebebasan dalam mengakses informasi masih terbatas.

Dari kedua faktor tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menentukan isu-isu strategis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundangan.
3. Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Peningkatan Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru 5 (lima) tahun kedepan untuk merealisasikan visi dan misi serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru menetapkan sasaran dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru.
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaam Barang Milik Daerah.

Adapun penyajian rumusan tujuan, sasaran beserta indicator kinerja jangka menengah yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut :

Table 4.1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

5.1.1 Strategi.

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis tujuan dan sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banjarbaru menetapkan strategi yang tepat dalam periode 2016-2021 sebagaimana berikut :

1. Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan meningkatkan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah serta peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Peningkatan sistem pengelolaan perbendaharaan keuangan.
3. Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi SKPD Pemko Banjarbaru.
4. Meningkatkan mutu sistem/aplikasi BMD, reward penghargaan bagi pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah pada SKPD.

5.1.2. Kebijakan SKPD

Kebijakan dapat diartikan sebagai arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru menetapkan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban.

2. Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.
3. Melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan dan barang daerah secara berkala.
4. Peningkatan kualitas pelayanan prima pengelolaan keuangan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
5. Melakukan perbaikan dalam pencatatan dan penyajian aset tanah, bangunan dan selain aset tanah dan bangunan dalam aplikasi BMD.
6. Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring /evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada SKPD.

Adapun penyajian rumusan strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam periode 2016 - 2021 sebagaimana dalam tabel 5.1 berikut :

Table 5.1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru periode 2016-2021.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan jasa surat menyurat .
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Penyediaan Jasa Non PNS
11. Pengolahan Dokumen Arsip

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Pendidikan dan pelatihan Non Formal
2. Bimtek penyusunan laporan keuangan SKPD berdasarkan standart akuntansi berbasis Akrual

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
6. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan
7. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
8. Penyusunan dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
9. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah

VI. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Penyusunan standar satuan harga
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Peningkatan manajemen sistem penggajian PNS
9. Peningkatan pengelolaan dan penatausahaan uang dan investasi daerah
10. Percepatan penyelesaian masalah aset
11. Peningkatan manajemen aset/barang daerah (SKPKD)
12. Rekonsiliasi laporan keuangan terhadap aset lancar dan aset tetap Pemko Banjarbaru

dengan SKPD

13. Penyusunan data standar rencana kebutuhan barang unit SKPD
14. Penyusunan barang milik daerah
15. Monitoring dan evaluasi dana perimbangan
16. Rekonsiliasi dana lain-lain pendapatan asli daerah
17. Monitoring dan evaluasi dana lain-lain pendapatan yang sah
18. Penyusunan naskah perjanjian hibah daerah
19. Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
20. Evaluasi Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua
21. Refresh Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berdasarkan Akuntansi Berbasis Akrua

VII. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

1. Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan SKPD

VIII. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1. Pendataan dan pengawasan tim penilai tuntutan ganti rugi (TPTGR)

IX. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi keuangan daerah

Adapun penyajian program/kegiatan dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru periode 2016-2021 adalah sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPKAD Kota Banjarbaru sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 disusun sebagai dokumen perencanaan yang berdimensi 5 tahunan dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD Kota Banjarbaru yang diselaraskan dengan tupoksi dan tata kerja dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi masing-masing bidang dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka menyusun program/kegiatan tahunan dengan lebih fokus pada output dan outcome yang ditargetkan guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif, efisien sehingga program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sudah memadai dan mendukung untuk mencapai sasaran hasil yang ditetapkan oleh RPJMD Kota Banjarbaru.

Penetapan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada bab VI merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 sebagai dasar pelaksanaan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja SKPD dan program kegiatan prioritas.
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Renca Kerja dan Anggaran
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021 dengan baik dan benar. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJAD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam mendukung untuk mencapai sasaran hasil yang ditetapkan oleh RPJMD Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, 30 Oktober 2018
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KOTA BANJARBARU**

H.JAINUDIN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 198602 1 008

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL 20 PERENCANAAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							KINERJA	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP		
							7	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19			
			4	5	6																	
Meningkatkan kepuasan dalam pelayanan Internal	Meningkatkan kepuasan dalam pelayanan Internal		1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Pelayanan Internal	N/A	N/A	1,060,355,950	80.00%	1,693,351,000	80.50%	1,371,865,600	82.75%	1,502,072,600	83.06%	1,532,996,940	85.02%	1,563,834,500	85.02%	7,664,120,640		
			1.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penerbitan dokumen administrasi perkantoran tepat waktu	6 dokumen	6 dokumen	9,549,000	6 dokumen	10,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	20,259,000	
			1.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 bulan	82,098,000	12 bulan	220,282,000	12 kali	200,400,000	12 kali	236,400,000	12 kali	241,128,000	12 kali	245,960,000	60 kali	1,226,258,000		
			1.20.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 Jenis	16 Jenis	19,974,000	16 Jenis	60,725,000	16 Jenis	102,775,000	16 Jenis	143,522,000	16 Jenis	146,392,440	16 Jenis	149,320,500	16 Jenis	602,734,940		
			1.20.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	1 orang	1 orang	9,000,000	1 orang	6,000,000	1 orang	6,000,000	1 orang	30,000,000								
			1.20.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia	36 Jenis	36 Jenis	73,298,000	44 jenis	93,000,000	45 jenis	56,689,400	44 jenis	59,911,900	44 jenis	61,110,000	59 jenis	62,332,200	59 jenis	333,043,500		
			1.20.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	14 Jenis	14 Jenis	39,659,950	10 Jenis	34,040,000	15 Jenis	21,462,200	12 Jenis	21,462,200	13 Jenis	21,892,000	18 Jenis	22,330,000	18 Jenis	121,186,400		
			1.20.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	24,352,000	2 jenis	16,104,000	2 jenis	13,692,000	2 Jenis	13,692,000	2 Jenis	13,965,800	2 Jenis	14,245,000	2 Jenis	71,698,800		
			1.20.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	3000 Orang	650 Orang	102,625,000	650 Orang	111,700,000	450 orang	77,832,000	450 orang	84,332,000	500 orang	86,018,600	550 orang	87,750,000	4650 orang	447,632,600		
			1.20.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	75 Kali	75 Kali	350,000,000	95 Kali	640,000,000	80 Kali	478,990,000	85 Kali	522,360,500	85 Kali	532,807,700	85 Kali	543,750,000	530 Kali	2,717,908,200		
			1.20.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Penyediaan Jasa Non PNS	15 orang	15 orang	319,800,000	15 orang	430,790,000	15 orang	351,120,000	15 orang	351,120,000	15 orang	358,142,400	15 orang	365,306,000	15 orang	1,856,478,400		
			1.20.01.21	Pengolahan Dokumen Arsip	Jumlah dan jenis dokumen arsip yang dikelola	2 Jenis	2 Jenis	30,000,000	2 Jenis	70,000,000	2 Jenis	62,905,000	2 Jenis	63,272,000	2 Jenis	65,540,000	2 Jenis	66,850,800	2 Jenis	328,567,800		
			1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	5,032,131,275	100%	1,005,025,000	100%	793,780,000	100%	700,404,000	100%	714,411,300	100%	728,711,550	100%	8,974,454,125		
			1.20.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / oprasional yang diadakan	310 Unit R2 20 Unit R3 55 Unit R4 17 Unit R6	310 Unit R2 20 Unit R3 55 Unit R4 17 Unit R6	4,488,039,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 Unit Roda 4	4,488,030,000	
			1.20.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam kondisi baik	11 Jenis	11 Jenis	34,988,000	15 Jenis	305,360,000	10 Jenis	128,830,000	12 Jenis	60,540,000	20 Jenis	61,750,800	18 Jenis	62,985,000	20 Jenis	654,453,800		
			1.20.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah atau jenis peralatan gedung kantor yang diadakan dalam kondisi baik	2 Jenis	2 Jenis	40,000,000	5 Jenis	225,000,000	3 Jenis	122,020,000	5 Jenis	120,040,000	5 Jenis	122,440,800	35 Jenis	124,900,000	5 Jenis	754,400,800		
			1.20.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	1 Gedung	1 Gedung	100,000,000	1 Gedung	10,000,000	1 Gedung	100,000,000	1 Gedung	70,000,000	1 Gedung	71,400,000	1 Gedung	72,828,000	1 Gedung	424,228,000		
			1.20.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang dipelihara dalam kondisi baik	1 Mobil Jabatan	1 Mobil Jabatan	35,000,000	1 Mobil Jabatan	40,155,000	1 Mobil Jabatan	38,070,000	1 Mobil Jabatan	38,070,000	1 Mobil Jabatan	38,831,400	1 Mobil Jabatan	39,610,000	1 Mobil jabatan	229,736,400		
			1.20.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / oprasional yang dipelihara dalam kondisi baik	25 Unit Roda 2 6 Unit roda 4	25 Unit Roda 2 6 Unit roda 4	78,904,275	9 Unit Roda 2 3 Unit roda 4	158,050,000	9 Unit Roda 2 3 Unit roda 4	137,705,000	9 Unit Roda 2 3 Unit roda 4	129,115,000	9 Unit Roda 2 3 Unit roda 4	131,697,300	9 Unit Roda 2 3 Unit roda 4	134,331,200	9 Unit Roda 2 3 Unit roda 4	769,802,775		
			1.20.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala dalam kondisi baik	5 Jenis	5 Jenis	13,923,000	5 Jenis	18,800,000	5 Jenis	17,580,000	5 Jenis	23,160,000	5 Jenis	23,623,000	5 Jenis	24,096,000	5 Jenis	121,182,000		

	1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala dalam kondisi baik	2 Jenis	2 Jenis	21,277,000	3 Jenis	27,660,000	3 Jenis	29,575,000	3 Jenis	50,479,000	3 Jenis	51,488,000	3 Jenis	52,517,750	3 Jenis	232,996,750					
				42	Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang rehabilitasi ringan/ sedang	1 Gedung	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	209,000,000	1 Gedung	213,180,000	1 Gedung	217,443,600	1 Gedung	1,299,623,600			
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	300,000,000	100%	309,000,000	100%	72,000,000	100%	72,000,000	100%	74,900,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	602,900,000			
				05	04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non Formal	15 Orang	15 Orang	100,000,000	20 Orang	85,000,000	20 Orang	72,000,000	20 Orang	72,000,000	20 Orang	74,900,000	25 Orang	75,000,000	125 orang	478,900,000				
				05	11	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berdasarkan Standart Akuntansi Berbasis Akrua	Meningkatnya kemampuan kasubag keuangan/perencanaan dalam menyusun laporan keuangan SKPD sesuai SAP dan berbasis akrual	34 SKPD	34 SKPD	200,000,000	34 SKPD	224,000,000	34 SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	34 SKPD	424,000,000			
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase rekomendasi Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tindak lanjuti sesuai SAP	100%	100%	496,534,450	100%	784,412,550	100%	663,311,000	100%	649,011,600	100%	664,490,000	100%	688,650,000	100%	3,449,875,150					
	1	20	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan realisasi APBD semester I	1 dokumen	1 dokumen	66,580,000	1 dokumen	262,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	262,750,000					
							1	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan realisasi prognosis	1 dokumen	1 dokumen	17,247,550	1 dokumen	17,247,550	1 dokumen	15,067,000	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	32,314,550	
							1	06	08	Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah	Laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi unaudit	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	414,042,000	1 dokumen	412,665,000	1 dokumen	420,000,000	1 dokumen	437,500,000	4 dokumen	1,684,207,000
									Laporan keuangan pemerintah daerah		1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	4 dokumen	-	
									Bimtek dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan SKPD		3 kali	-	-	-	-	3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	15 kali	-	
									Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD		34 SKPD	-	-	-	-	32 SKPD	-	32 SKPD	-	32 SKPD	-	32 SKPD	-	32 SKPD	-	
									04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Baanjarbaru	2 Dokumen	2 Dokumen	217,461,000	2 Dokumen	341,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	341,600,000
									05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan SKPD tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	32,127,600	1 Dokumen	32,127,600	1 Dokumen	33,500,000	1 Dokumen	35,000,000	5 Dokumen	-
									Waktu penyelesaian surat perintah membayar (SPM) yang dinyatakan lengkap dan sah secara tepat waktu		1 hari	1 hari	-	1 hari	-	1 hari	-									
									01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	-	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	19,739,400	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	25,000,000	40 Dokumen	119,739,400
		06	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan	Penyusunan laporan realisasi APBD triwulan IV,I,II dan III	4 dokumen	4 dokumen	105,245,900	4 dokumen	74,315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	74,315,000							
		07	Penyusunan dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan realisasi APBD triwulan IV,I,II dan III	4 dokumen	-	-	-	4 Dokumen	161,950,000	4 Dokumen	158,905,000	4 Dokumen	165,000,000	4 Dokumen	170,000,000	16 Dokumen	655,855,000								
		Tersusunnya laporan realisasi APBD semester I		1 Dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	4 dokumen	-									
		09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset / Barang	Kesesuaian BMD BPKAD dengan neraca aset	100%	100%	30,000,000	100%	23,500,000	100%	20,385,000	100%	20,314,000	100%	20,990,000	100%	21,150,000	100%	106,339,000							

				Persentase tanah milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bersertifikat	4.00	4.41	5.51	7.77	14.55	10.03	12.29	14.55								
1	20	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga barang/jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	58,252,950	1 Dokumen	58,855,000	1 Dokumen	235,034,000	1 Dokumen	240,433,250	1 Dokumen	245,241,915	1 Dokumen	250,147,000	5 Dokumen	1,029,711,165
1	20	17	46	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Revisi Kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000
1	20	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah dokumen Rancangan Perda APBD dan dokumen pendukung yang tersusun	1 Raperda	1 Raperda	1,366,768,500	1 Raperda	1,699,500,000	1 Raperda	2,023,488,500	1 Raperda	1,355,283,000	1 Raperda	1,382,388,660	1 Raperda	1,410,037,000	5 Raperda	7,870,697,160
1	20	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Banjarbaru Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru	1 Raperwali	1 Raperwali	130,402,500	1 Raperwali	206,902,500	1 Raperwali	178,720,000	1 Raperwali	177,842,000	1 Raperwali	181,398,840	1 Raperwali	185,026,800	5 Raperwali	929,890,140
1	20	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD dan dokumen pendukung yang tersusun	1 Raperda	1 Raperda	196,082,750	1 Raperda	128,240,000	1 Raperda	111,177,600	1 Raperda	111,156,000	1 Raperda	113,379,120	1 Raperda	115,646,700	5 Raperda	579,599,420
1	20	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Banjarbaru	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Banjarbaru	1 Raperwali	1 Raperwali	149,955,000	1 Raperwali	178,705,000	1 Raperwali	155,442,000	1 Raperwali	148,626,000	1 Raperwali	151,598,520	1 Raperwali	154,630,500	5 Raperwali	789,002,020
1	20	17	45	Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	Jumlah dokumen naskah perjanjian hibah daerah dan dokumen pendukung yang tersusun	11 Dokumen	11 Dokumen		16 Dokumen	183,650,000	16 Dokumen	187,420,500	16 Dokumen	118,952,500	16 Dokumen	121,331,550	16 Dokumen	123,758,200	80 Dokumen	735,112,750
1	20	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Raancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan dokumen pendukung yang tersusun	1 Raperda	1 Raperda	95,426,600	1 Raperda	75,950,000	1 Raperda	66,381,000	1 Raperda	68,860,100	1 Raperda	70,237,302	1 Raperda	71,642,000	5 Raperda	353,070,402
1	20	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	1 Raperwali	1 Raperwali	95,426,250	1 Raperwali	95,426,000	1 Raperwali	75,940,500	1 Raperwali	75,440,400	1 Raperwali	76,949,208	1 Raperwali	78,489,000	5 Raperwali	402,245,108
1	20	17	21	Peningkatan Manajemen Sistem Penggajian PNS	Jumlah dokumen gaji PNS Pemerintah Kota Banjarbaru	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	32,425,000	12 dokumen	29,920,000	12 dokumen	50,929,000	12 dokumen	51,947,580	12 dokumen	52,987,000	60 dokumen	218,208,580
					Jumlah SKPP yang purna tugas yang diterbitkan			76,385,000	52 SKPP		260 SKPP									
1	20	17	22	Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Uang dan Investasi Daerah	Jumlah dokumen SPP dan SPM yang telah diverifikasi	5.000 lembar	5.000 lembar	86,500,000	5.250 lembar	109,850,000	5.500 lembar	174,990,000	5.750 lembar	170,000,000	6.000 lembar	173,400,000	6.250 lembar	176,868,000	28.750 lembar	805,108,000
1	20	17	24	Percepatan Penyelesaian masalah Aset	Jumlah persil tanah yang disampaikan ke BPN untuk mengganti nama kepemilikan menjadi atas nama Pemko Banjarbaru	10 Dokumen	10 Dokumen	179,000,000	10 Dokumen	425,088,000	10 Dokumen	886,061,000	10 Dokumen	1,035,605,000	10 Dokumen	1,056,317,100	10 Dokumen	1,077,443,400	50 Dokumen	4,480,514,500
1	20	17	25	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (SKPKD)	Jumlah BMD yang dikuasai pengelola barang telah dilakukan pemeliharaan	6 Dokumen	6 Dokumen	2,500,000,000	1 Dokumen	3,292,070,350	1 Dokumen	430,000,000	1 Dokumen	392,039,200	1 Dokumen	399,879,984	1 Dokumen	407,877,500	6 Dokumen	4,921,867,034
1	20	17	27	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terhadap Aset Lancar dan Aset tetap Pemko Banjarbaru dengan SKPD	Laporan rekonsiliasi barang persediaan terhadap anggaran belanja pakai habis yang telah dicairkan pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	66,389,750	4 Dokumen	96,946,700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Dokumen	163,336,450
			28	Rekonsiliasi persediaan barang dan jasa Pemerintah Kota dengan SKPD	Jumlah dokumen Laporan barang persediaan dan dokumen pendukung yang tersusun	-	-	-	-	-	4 Dokumen	117,520,700	4 Dokumen	99,146,500	4 Dokumen	101,129,430	4 Dokumen	103,152,000	16 Dokumen	317,796,630
1	20	17	30	Penyusunan Data Standart Rencana Kebutuhan Barang Unit SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan pemeliharaan barang daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	125,000,000	2 Dokumen	109,600,000	2 Dokumen	224,791,500	2 Dokumen	112,397,400	2 Dokumen	114,645,348	2 Dokumen	116,938,000	10 Dokumen	678,372,248
1	20	17	31	Penyusunan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah dan dokumen pendukung yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	164,267,950	1 Dokumen	300,217,950	1 Dokumen	788,678,500	1 Dokumen	988,922,500	1 Dokumen	1,008,700,950	1 Dokumen	1,028,875,000	6 Dokumen	4,115,394,900
					Jumlah dokumen Laporan penambahan BMD	2 Dokumen	2 Dokumen		12 Dokumen											
					Jumlah dokumen Laporan pengurangan BMD	2 Dokumen	2 Dokumen		12 Dokumen											

1	20	17	39	Monitoring dan Evaluasi Dana Lain-lain Pendapatan Yang Syah	Laporan penerimaan dana bagi hasil (DBH) propinsi	-	-	-	4 Dokumen	20,361,000	4 Dokumen	16,355,400	4 Dokumen	20,605,400	4 Dokumen	21,017,508	4 Dokumen	21,438,000	20 Dokumen	99,777,308
1	20	17	37	Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan	Laporan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	4 Dokumen	50,082,000	4 Dokumen	42,991,600	4 Dokumen	120,391,600	4 Dokumen	122,799,432	4 Dokumen	125,300,000	20 Dokumen	461,564,632
1	20	17	38	Rekonsiliasi Dana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Laporan Monitoring dan evaluasi realisasi PAD lainnya yang sah	-	-	-	4 Dokumen	37,375,900	4 Dokumen	29,794,500	4 Dokumen	22,636,500	4 Dokumen	23,089,230	4 Dokumen	23,552,000	20 Dokumen	136,448,130
1	20	17	40	Evaluasi Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Meningkatnya kemampuan kasubag Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan kebijakan akuntansi berbasis akrual	34 SKPD	34 SKPD	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 SKPD	89,200,200
1	20	17	41	Refresh Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berdasarkan Akuntansi Berbasis Akrua	Meningkatnya kemampuan Kasubag Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual	34 SKPD	34 SKPD	332,121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 SKPD	45,680,000
1	20	20	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penerimaan tuntutan ganti rugi (TGR)	100%	100%	91,730,000	100%	27,575,000	100%	133,615,000	100%	102,849,000	100%	104,905,980	100%	115,397,000	100%	484,341,980
1	20	20	09	Pendataan dan Pengawasan Tim Penilai Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Keputusan penetapan tuntutan ganti rugi	20 SK	5 SK	91,730,000	5 SK	27,575,000	20 SK	133,615,000	20 SK	102,849,000	20 SK	104,905,980	20 Dokumen	115,397,000	90 Dokumen	484,341,980
1	20	23	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase SKPD yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Daerah	100.00%	100.00%	360,524,000	100%	466,950,000	100%	434,265,000	100%	442,585,000	100%	451,436,700	100%	460,465,000	100%	2,255,701,700
1	20	23	02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi Keuangan Daerah	Aplikasi SIMDA Keuangan dalam kondisi baik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	360,524,000	1 Aplikasi	466,950,000	1 Aplikasi	434,265,000	1 Aplikasi	442,585,000	1 Aplikasi	451,436,700	1 Aplikasi	460,465,000	1 Aplikasi	2,255,701,700
					Pemeliharaan server Simda Keuangan	4 server	4 server		4 server		2 server		2 server		2 server		2 server		2 server	
1	20	23	23	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota	100%	100%	204,020,000	100.00%	46,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	250,930,000
1	20	23	02	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD	Pelayanan Permintaan Pembayaran/Pencairan SPM SKPD sesuai dengan SPM	35 SKPD	35 SKPD	204,020,000	39 SKPD	46,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35 SKPD	250,930,000
				JUMLAH				13,317,273,925		11,372,011,050		9,243,543,900		8,778,188,550		8,958,592,597		9,155,866,150		47,508,202,247



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD
Kota Banjarbaru

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target RenstraSKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Penyerapan Anggaran	90.67%	90.80%	91.00%	92.10%	93.00%	89.35%	85.30%	79.70%	86.94%	84.32%	98.54%	93.94%	87.58%	94.40%	90.67%
3	Prosentase Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah	92%	94%	95%	96%	96.50%	92.46%	94.21%	95.26%	96.13%	96.53%	99%	100.22%	100.27%	100.14%	100.03%
4	Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPKAD
 Kota Banjarbaru

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
BELANJA DAERAH	536.450.000.495.92	636.396.347.150.00	783.702.873.340.00	944.932.934.274.53	1.285.980.999.919.09	479.737.985.114.50	550.492.573.721.00	642.131.847.661.00	822.937.911.883.00	1.084.290.161.372.38	89.43	86.502	81.93	87.09	84.32	187.382.747.356	151.138.044.064
Belanja Tidak Langsung	263.729.310.495.00	316.992.084.400.00	336.230.674.815.00	367.109.835.260.00	420.531.329.820.00	251.497.925.825.50	295.379.488.508.00	320.209.888.564.00	345.142.994.876.00	382.559.409.344.00	95.36	93.182	95.24	94.02	90.97	39.200.504.831	32.765.370.880
Belanja pegawai	243.880.279.715.00	292.941.031.539.00	315.188.694.335.00	351.523.803.780.00	389.916.037.315.00	238.138.192.742.50	280.339.162.874.00	301.994.418.577.00	335.248.525.295.00	359.218.639.042.00	97.65	95.698	95.81	95.37	92.13	36.508.939.400	30.270.111.575
Belanja Hibah	8.928.564.780.00	5.289.950.861.00	10.425.315.000.00	6.221.250.000.00	25.218.034.200.00	5.512.050.000.00	4.334.343.000.00	10.154.590.000.00	3.361.184.000.00	19.958.583.000.00	61.74	81.935	97.40	54.03	79.14	7.993.706.815	7.597.189.750
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000.00	7.631.312.000.00	1.500.000.000.00	1.500.000.000.00	620.036.000.00	131.244.480.00	6.122.249.131.00	65.365.600.00	792.750.000.00	-	8.75	80.225	4.36	52.85	0.00	3.712.953.000	3.392.005.646
Belanja Langsung	272.720.700.000.92	319.404.262.750.00	447.482.198.525.00	577.823.099.014.53	865.449.670.099.09	229.477.663.023.00	255.113.085.213.00	321.921.959.097.00	477.794.917.007.00	701.730.752.028.38	84.14	79.872	71.94	82.69	81.08	148.182.242.525	118.063.272.251
Belanja pegawai	33.514.392.000.00	27.935.399.600.00	33.091.210.000.00	32.819.760.476.00	39.599.098.160.00	29.689.395.599.00	23.045.955.316.00	28.858.014.177.00	29.271.162.026.00	33.158.052.211.00	88.59	82.497	87.21	89.19	83.73	4.446.397.502	4.188.884.295
Belanja Barang dan jasa	101.457.428.144.92	132.454.024.825.00	164.167.752.377.00	198.737.716.338.00	264.434.912.850.00	90.000.265.581.00	105.208.258.496.00	138.816.598.238.00	166.093.756.700.00	190.596.958.392.18	88.71	79.430	84.56	83.57	72.08	40.744.371.176	25.149.173.203
Belanja Modal	137.748.879.856.00	159.014.838.325.00	250.223.236.148.00	346.265.622.200.53	561.415.659.089.09	109.788.001.843.00	126.858.871.401.00	154.247.346.682.00	282.429.998.281.00	477.975.741.425.20	79.70	79.778	61.64	81.56	85.14	105.916.694.808	92.046.934.896

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD BPKAD
 Kota Banjarbaru

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE						NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						
			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
									2	Meningkatnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
									3	Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	90	90	92	95	97	100	
									4	Meningkatnya kualitas Penatausahaan BMD Kota Banjarbaru	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Pemerintah Kota Banjarbaru	100	100	100	100	100	100	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan dan barang daerah secara berkala	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan pembinaan/sosialisasi secara berkala
			Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada SKPD.	Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual
		Meningkatnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru	Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan meningkatkan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah serta peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban.
			Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.	Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten
		Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan prima pengelolaan keuangan secara tepat waktu dan tepat sasaran
			Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi SKPD Pemko Banjarbaru	
MISI 2 : Mengembangkan sistem manajemen dan tata kelola aset yang akurat dan akuntabel.				

		Meningkatnya kualitas Penatausahaan BMD Kota Banjarbaru	Meningkatkan mutu sistem/aplikasi BMD, reward penghargaan bagi pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah pada SKPD.	Melakukan perbaikan dalam pencatatan dan penyajian aset tanah, bangunan dan selain aset tanah dan bangunan dalam aplikasi BMD
				Melakukan rekonsiliasi BMD secara langsung dan monitoring /evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada SKPD

|

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Banjarbaru

Aspek / Fokus / Bidang / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									
KEUANGAN									
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA terhadap APBD	%	15.84	9.16	10.93	10.70	10.45	10.30	10.15	10.15
Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	%	0.26	0.52	0.80	0.85	0.87	0.59	0.50	0.50
		2.47	1.85	1.42	1.31	1.25	1.15	1.09	1.09
Persentase belanja pendidikan 20 %	%	19.84	22.06	23.08	23.15	23.40	23.80	23.90	23.90
Persentase belanja kesehatan 10 %	%	11.98	15.55	18.32	18.45	18.65	18.70	18.85	18.85
Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung	%	54.53	65.22	62.14	59.31	59.60	59.90	60.25	60.25
		32.7	34.78	37.86	40.69	40.40	40.10	39.75	39.75
Bagi Hasil Kab/Kota	%	88.09	85.66	100.77	90.00	94.00	99.00	105.00	105.00
Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banjarbaru

Bidang Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																	
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
KEUANGAN																	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				42,441		43,869		39,859		37,955		38,654		39,028		39,123	
BELANJA TIDAK LANGSUNG			36,335	29,127		32,491		30,605		29,165		29,686		29,925		29,925	
Belanja Pegawai		Rp	12,993	11,295		11,295		11,355		11,415		11,415		11,475		11,475	
Belanja Subsidi		Rp	-	1,000		1,782		2,000		500		500		500		500	
Belanja Hibah		Rp	19,959	13,300		16,018		13,854		13,854		14,375		14,500		14,500	
Belanja Bantuan Sosial		Rp	2,541	1,432		1,350		1,350		1,350		1,350		1,400		1,400	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		Rp	842	1,100		1,046		1,046		1,046		1,046		1,050		1,050	
Belanja Tak Terduga		Rp	-	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
BELANJA LANGSUNG				13,314		11,378		9,254		8,790		8,968		9,103		9,198	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Internal	Persen	N/A	83.00	1,060	83.33	1,693	83.50	1,371	83.75	1,502	84.06	1,532	85.02	1,569	85.02	1,414
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	5,032	100	1005	100	793	100	700	100	714	100	742	100	742
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Persen	100	100	300	100	309	100	72	100	72	100	74	100	125	100	125
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase rekomendasi Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tindak lanjuti sesuai SAP	Persen	100	100	496	100	784	100	663	100	649	100	664	100	689	100	689
	Persentase realisasi serapan anggaran belanja langsung daerah	Persen	85.14	84.20		84.40		84.70		85.20		85.65		86.00		86.00	
	Persentase realisasi serapan anggaran belanja tidak langsung daerah	Persen	83.75	89.90		90.00		90.30		91.40		91.75		92.00		92.00	
	Nilai AKIP BPKAD	Nilai	CC	CC		B		B		B		BB		BB		BB	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Sumber Daya Aparatur	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	100	14	100	14	100	14	100	14	100	14
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase rekomendasi Rancangan Perda APBD yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	100	5771	100	7038	100	5774	100	5309	100	5415	100	5523	100	5523

Persentase rekomendasi Rancangan Perda APBD Perubahan yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi Rancangan Perwali penjabaran APBD yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi Rancangan Perwali penjabaran APBD Perubahan yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase realisasi Dana Perimbangan	Persen	101.16	95	95	95	95	95	95	95
Prosentase realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persen	86.58	95	95	95	95	95	95	95
Persentase rekomendasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase item anggaran belanja mempunyai standar harga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang barang persediaannya telah direkonsiliasi	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100
Persentase jumlah SP2D yang diverifikasi	Persen	89	90	90	92	95	97	100	100
Persentase rekomendasi Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi Rancangan Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase realisasi Dana Lain-Lain PAD yang telah diverifikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang BMD nya telah direkonsiliasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase perencanaan kebutuhan barang dan pemeliharaan BMD yang telah diverifikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase BMD yang dikuasi pengelola barang telah direkonsiliasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase tanah milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bersertifikat	Persen	4.00%	4.41%	5.51%	7.77%	10.03%	12.29%	14.55%	14.55%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penerimaan tuntutan ganti rugi (TGR)	Persen	100	100	91	100	37	100	133	100	102	100	104	100	41	100	41
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase SKPD yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Daerah	%	100	100	360	100	466	100	434	100	442	100	451	100	400	100	400
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	%	100	100	204	100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	100	250